



# **ILMU FILSAFAT DALAM SISTEM KESEHATAN**

## **PERSPEKTIF BPJS SEBAGAI PILAR Keadilan Sosial**

**dr. Deborah Johana Rattu, MH. Kes., MKM., Sp. DLP.**  
**Prof. Dr.T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., M.Hum.**

**EDITOR**  
**Dr. Itok Dwi Kurniawan S.H., M.H.**



# **ILMU FILSAFAT DALAM SISTEM KESEHATAN : PERSPEKTIF BPJS SEBAGAI PILAR Keadilan Sosial**

## **PENULIS**

**dr. Deborah Johana Rattu, MH. Kes., MKM., Sp. DLP.**

**Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., M.Hum.**

## **EDITOR**

**Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H.**



## **UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**ILMU FILSAFAT DALAM SISTEM  
KESEHATAN:  
PERSPEKTIF BPJS SEBAGAI PILAR Keadilan  
SOSIAL**

**dr. Deborah Johana Rattu, MH. Kes., MKM., Sp. DLP.  
Prof. Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.I., M.Hum.**

**EDITOR:  
Dr. Itok Dwi Kurniawan, S.H., M.H.**

**TATA LETAK:  
Muhammad Adhar**

**DESAIN SAMPUL:  
Muhammad Adhar**

**SUMBER:  
[www.tdjpublisher.com](http://www.tdjpublisher.com)**

**ISBN:  
978-634-7051-83-7**

**CETAKAN PERTAMA:  
Maret 2025**

**UKURAN:  
i + 147 Hal; 15,5 cm x 23 cm**

---

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

---

**ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022**  
**TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER**  
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima  
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur  
E-mail: [tdj.denarapublisher@gmail.com](mailto:tdj.denarapublisher@gmail.com)  
Telepon: 0380-8436618/081220051382



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan berkah-Nya, sehingga buku dengan judul Ilmu Filsafat dalam Sistem Kesehatan: Perspektif BPJS sebagai Pilar Keadilan Sosial ini dapat diselesaikan dengan baik.

BPJS Kesehatan berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Program seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI) memberikan subsidi bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka tetap dapat menikmati manfaat jaminan kesehatan. Meskipun sistem kesehatan Indonesia telah mengalami berbagai upaya perbaikan, tantangan seperti ketidakmerataan fasilitas, keterbatasan pembiayaan, serta meningkatnya penyakit tidak menular masih menghambat pemerataan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan berperan penting dalam memastikan akses yang setara bagi masyarakat, meskipun tantangan dalam distribusi layanan masih ada. Dengan pendekatan berbasis filsafat, sistem kesehatan diharapkan dapat berkembang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berdasarkan asas keadilan sosial. Kami menyadari bahwa meskipun buku ini berusaha menyajikan perspektif yang komprehensif, tentunya masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami hargai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas karya ini di masa depan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam memperdalam pemahaman kita tentang

filsafat dalam konteks sistem kesehatan dan peran penting BPJS dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

# DAFTAR ISI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>I</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>III</b> |
| <b>BAB I FILSAFAT ILMU DAN KESEHATAN.....</b>        | <b>1</b>   |
| 1.1    PENGANTAR FILSAFAT ILMU .....                 | 1          |
| 1.2    FILSAFAT KESEHATAN: SEBUAH TINJAUAN HISTORIS  | 3          |
| 1.3    PARADIGMA FILSAFAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN  | 6          |
| 1.4    RELEVANSI FILSAFAT DALAM SISTEM KESEHATAN     |            |
| MODERN.....                                          | 9          |
| <b>BAB II FILSAFAT DAN KONSEP DASAR KESEHATAN</b>    |            |
| <b>.....</b>                                         | <b>14</b>  |
| 2.1    PENGERTIAN FILSAFAT DALAM KONTEKS KESEHATAN   |            |
| 14                                                   |            |
| 2.2    HUBUNGAN FILSAFAT DENGAN ILMU KESEHATAN....   | 18         |
| 2.3    PRINSIP-PRINSIP DASAR KESEHATAN MASYARAKAT    | 22         |
| 2.4    ETIKA DAN MORAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN     | 26         |
| <b>BAB III SISTEM KESEHATAN NASIONAL .....</b>       | <b>31</b>  |
| 3.1    SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM KESEHATAN DI      |            |
| INDONESIA .....                                      | 31         |
| 3.2    TANTANGAN DAN PERMASALAHAN DALAM SISTEM       |            |
| KESEHATAN.....                                       | 35         |
| 3.3    PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN            |            |
| KESEHATAN.....                                       | 40         |
| 3.4    KEBIJAKAN KESEHATAN DAN IMPLEMENTASINYA ..... | 44         |
| <b>BAB IV BPJS KESEHATAN SEBAGAI PILAR</b>           |            |
| <b>KEADILAN SOSIAL.....</b>                          | <b>49</b>  |
| 4.1    PRINSIP-PRINSIP BPJS KESEHATAN.....           | 49         |

|                                                                    |                                                                 |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2                                                                | PERAN BPJS DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Sosial                     | 53        |
| 4.3                                                                | TANTANGAN DAN KRITIK TERHADAP BPJS KESEHATAN .....              | 57        |
| <b>BAB V FILSAFAT Keadilan dalam Sistem Kesehatan .....</b>        |                                                                 | <b>62</b> |
| 5.1                                                                | KONSEP Keadilan dalam Filsafat .....                            | 62        |
| 5.2                                                                | Keadilan Sosial dalam Konteks Kesehatan ....                    | 66        |
| 5.3                                                                | IMPLEMENTASI Keadilan Sosial melalui BPJS Kesehatan .....       | 71        |
| 5.4                                                                | DAMPAK Keadilan Sosial terhadap Kualitas Hidup Masyarakat ..... | 76        |
| <b>BAB VI ANALISIS KRITIS TERHADAP Sistem BPJS Kesehatan .....</b> |                                                                 | <b>82</b> |
| 6.1                                                                | KELEBIHAN DAN KURANGAN Sistem BPJS Kesehatan .....              | 82        |
| 6.2                                                                | PERSPEKTIF Masyarakat terhadap BPJS Kesehatan .....             | 85        |
| 6.3                                                                | PERBANDINGAN DENGAN Sistem Kesehatan di Negara Lain .....       | 88        |
| 6.4                                                                | REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN Sistem BPJS Kesehatan .....         | 91        |
| <b>BAB VII TANTANGAN BPJS dalam Menjaga Keadilan Sosial .....</b>  |                                                                 | <b>96</b> |
| 7.1                                                                | KETIMPANGAN Akses dan Kualitas Pelayanan ..                     | 96        |
| 7.2                                                                | MASALAH Pembiayaan dan Keberlanjutan BPJS                       | 100       |
| 7.3                                                                | RESPONS TERHADAP KRITIK dan Keluhan Masyarakat .....            | 104       |
| 7.4                                                                | INOVASI dan REFORMASI Sistem BPJS .....                         | 109       |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB VIII MASA DEPAN BPJS DAN KEADILAN SOSIAL</b>                   | <b>114</b> |
| 8.1 VISI BPJS DALAM KONTEKS GLOBAL.....                               | 116        |
| 8.2 PERAN TEKNOLOGI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI<br>BPJS              | 121        |
| 8.3 KOLABORASI ANTAR SEKTOR UNTUK KESEHATAN<br>YANG BERKEADILAN ..... | 125        |
| 8.4 REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MASA DEPAN ..                         | 129        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                           | <b>134</b> |